



2021

RENJA

**Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah**

**PEMERINTAH KOTA JAMBI
T A H U N 2 0 2 0**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2018 - 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi. Guna mewujudkan Bappeda Sebagai Lembaga Perencanaan Yang Handal, Terpercaya Dan Profesional.

Jambi, Juli 2020
KEPALA BAPPEDA KOTA JAMBI

SUHENDRI, SH,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700404 199601 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019	15
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra	15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan perangkat Daerah	39
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	41
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	43
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	49
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	50
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	50

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	51
3.3 Program dan Kegiatan	54
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	62
BAB V PENUTUP	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi

Perangkat Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan bahan penyusunan rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan awal Renja fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Berbagai peraturan perundang-undangan menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Noor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kota Jambi tahun 2009 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016);
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi. Menurut Peraturan Walikota Jambi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi, mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan dan program penelitian dan pengembangan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan program penelitian dan pengembangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah dan program penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Berbagai tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dilaksanakan oleh Sekretariat dan Sub Bagian, Bidang dan Sub Bidang yang terdiri dari :

I. Sekretariat

1. Tugas Pokok

Membantu kepala badan dalam melaksanakan tugas ketatausahaan meliputi urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, administrasi keuangan dan kepegawaian serta melaksanakan tugas yang diberikan kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tugas Sub. Bagian

a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Program

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan program di lingkungan Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub. Bagian Keuangan

Mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan dilingkungan Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Tugas pokok

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu kepala badan dalam pengoordinasian penyusun dokumen-dokumen perencanaan dan anggaran daerah, pengendalian dan monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah, serta penyediaan data dan informasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Tugas Sub. Bidang

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan perencanaan penganggaran.

b. Sub Bidang Data dan Informasi

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah, kepala bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

dalam urusan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan perencanaan pembangunan

c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan perencanaan daerah.

III. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Tugas pokok

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu kepala badan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi urusan pendukung, penunjang bidang perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan pemerintahan umum, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk dan KB, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kewilayahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Tugas Sub. Bidang

a. Sub Bidang Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan pendukung, penunjang bidang perencanaan, pengawasan dan pemerintahan umum, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat (satpol pp), bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

b. Sub Bidang Pembangunan Manusia

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan perencanaan urusan penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk dan KB, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan

c. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kewilayahan.

IV. Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur

1. Tugas Pokok

Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur mempunyai tugas membantu kepala badan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi urusan penunjang bidang keuangan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (penanggulangan bencana dan kebakaran), pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, pariwisata, lingkungan hidup, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan,

kehutanan, dan energi sumber daya mineral serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Tugas Sub. Bidang

a. Sub Bidang Perekonomian

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan penunjang bidang keuangan, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, dan pariwisata.

b. Sub Bidang LH dan SDA

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, serta energi sumber daya mineral.

c. Sub Bidang Infrastruktur

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (penanggulangan bencana dan kebakaran), pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

V. Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Tugas pokok

Bidang Penelitian dan Pengembangan berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Kepala Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam perencanaan pembangunan urusan penelitian dan pengembangan serta

melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Tugas Sub. Bidang

a. Sub Bidang penelitian dan pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan bidang penelitian dan pengembangan.

b. Sub Bidang penelitian dan pengembangan Perekonomian, SDA dan Infrastruktur

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan bidang penelitian dan pengembangan.

c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan bidang penelitian dan pengembangan.

VI. UPTB

- 1) UPTB dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas UPTB ditetapkan dengan peraturan Walikota.

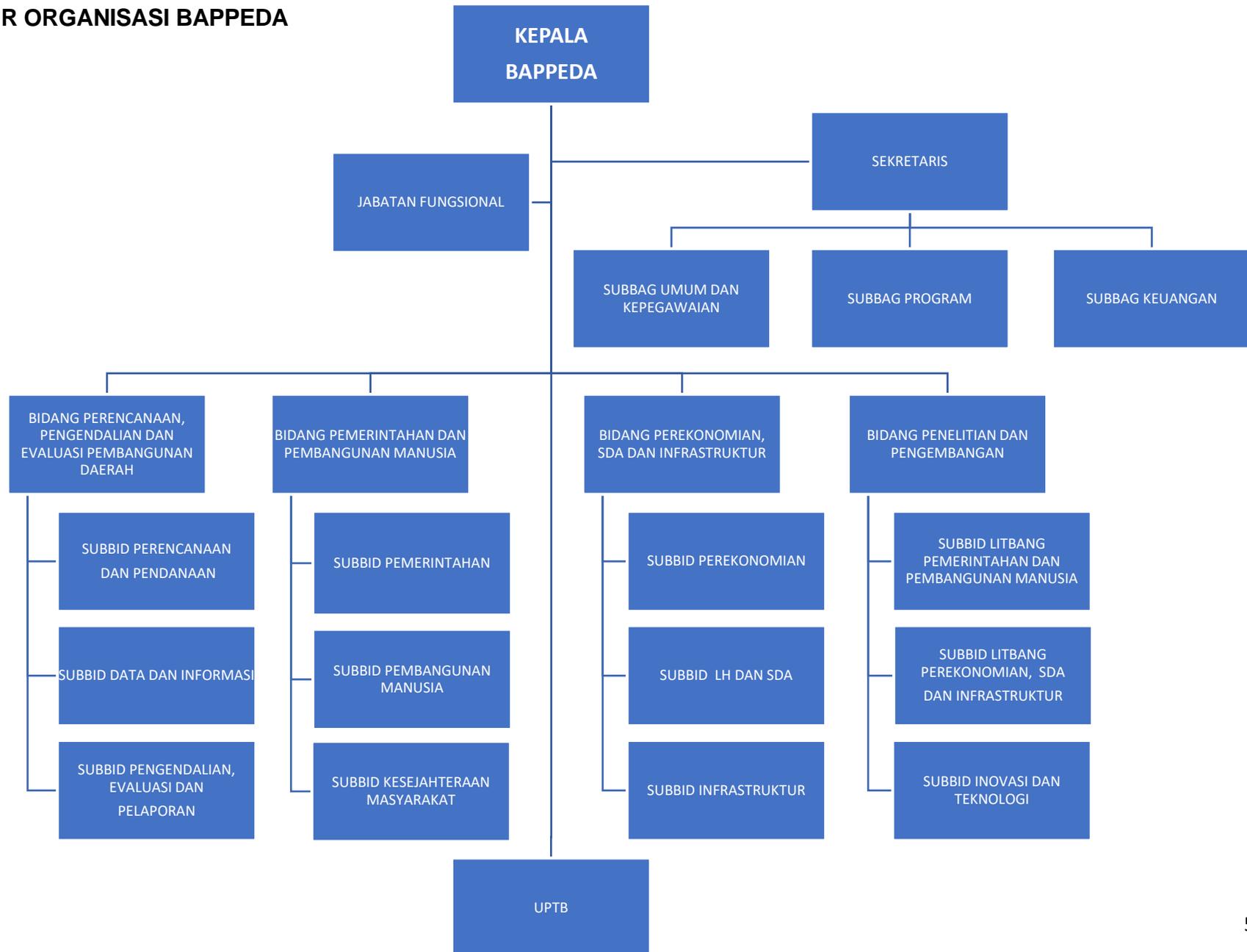
VII. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

- 2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan.
- 3) Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kepangkatan.
- 4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- 5) Tenaga fungsional dalam menyelenggarakan tugasnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Untuk lebih jelasnya sebagaimana tergambar pada struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA



1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Adapun maksud disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi adalah untuk menggambarkan lebih terperinci mengenai Rancangan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi adalah sebagai bahan masukan awal penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Memuat penjelasan umum yang melatar belakangi perlunya penyusunan Rencana Kerja OPD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan OPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menunjang perencanaan daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat tentang evaluasi pelaksanaan OPD tahun lalu dan capaian renstra, analisis kinerja pelayanan OPD, berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra OPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD
- b. Permasalahan dan Hmabatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal OPD dengan hal analisis kebutuhan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dan stake holder yang terkait

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas perkembangan nasional dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi kepala daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan beserta kebutuhan dana

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan jumlah program dan kegiatan tahun 2019

Bab V. Penutup

Berisikan tentang kaidah-kaidah pelaksana rencana tindak lanjut serta catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya kesediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra

Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2019 sebagaimana berikut :

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	21,85	21,85	100%
		Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	15,75	15,75	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	100%	123,25%	122,30%

Pada Sasaran 1 yaitu Meningkatkan Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan mempunyai 2 Indikator Sasaran sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja

Dengan Formulasi : Berdasarkan Penilaian Menpan atas komponen perencanaan kinerja pada evaluasi SAKIP tahun yang bersangkutan.

Hasil capaian Indikator Sasaran Ini adalah 100%, penilaian komponen perencanaan kinerja meliputi : penilaian terhadap Perencanaan Strategis sebesar 10 % dan Perencanaan Kinerja Tahunan sebesar 20%.

2. Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja

Dengan Formulasi : Berdasarkan Penilaian Menpan atas komponen pengukuran kinerja pada evaluasi SAKIP tahun yang bersangkutan.

Hasil capaian Indikator Sasaran Ini adalah 100%, penilaian komponen pengukuran kinerja meliputi : penilaian terhadap pemenuhan pengukuran sebesar 5%, kualitas pengukuran sebesar 12,5% dan implementasi pengukuran sebesar 7,5%

Dari hasil capaian Sasaran 1 pada tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa terkait tujuan dan sasaran pada tingkat Perangkat Daerah masih harus dilakukan perbaikan agar berorientasi hasil yang bermanfaat langsung untuk masyarakat dan memiliki indikator kinerja yang berkualitas.

Pada Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan mempunyai Indikator Sasaran yaitu Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD dengan formulasi sebagai berikut :

Persentase capaian seluruh indikator kinerja sasaran RPJMD dibagi dengan jumlah indikator sasaran yang sudah di rilis dikali 100%.

Hasil Capaian Indikator Sasaran ini adalah 122,30%. Dari 34 Indikator Sasaran pada RPJMD, sampai saat ini terdapat 33 Indikator Sasaran yang telah di rilis atau dipublikasikan, sementara 1 Indikator Sasaran belum dirilis yaitu Indeks Pembangunan Pemuda yang belum dikeluarkan oleh BAPPENAS.

Adapun Indikator Sasaran yang realisasi capaiannya melebihi 100% adalah : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 116,80%, Indeks Profesionalitas ASN sebesar 100,36%, Penyelesaian Jumlah Kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL sebesar 121,95%, Cakupan Layanan Infrastruktur dan Utilitas sebesar 111,48%, Indeks Kualitas Air sebesar 101,38%, Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 108,50%, Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan sebesar 175,94%, Skor Pola Pangan Harapan sebesar 100,22%, Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB sebesar 100,42%, Persentase peningkatan PAD sebesar 201,63%, Realisasi Investasi sebesar 245,06%, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 101,22%, Persentase Daya Saing Produk UKM sebesar 448,84%, Persentase koperasi berkualitas sebesar 102,74%, Angka Harapan Hidup sebesar 101,17%, Harapan Lama Sekolah sebesar 100,14%, Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 102,54% dan Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam

pembangunan sebesar 117,82%.

Tahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 6 (enam) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 13.376.458.423,- dengan rincian Rp. 4.930.877.178,- untuk belanja tidak langsung dengan realisasi sebesar Rp. 3.946.957.472,- atau serapan dana mencapai 80,05% dan Rp. 8.445.581.245,- untuk belanja langsung dengan realisasi sebesar Rp. 7.849.125.210,- atau serapan dana mencapai 92,94%.

Program dan kegiatan serta realisasi anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Realisasi Anggaran per Program TA. 2019

No.	Program	Anggaran	Realisasi	
			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.884.378.000	1.744.409.461	92,57%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.533.040.000	2.427.265.949	95,82%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	58.500.000	51.000.000	87,18%
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	40.000.000	15.842.000	39,61%
5.	Program Pengembangan Data/Informasi	265.000.000	264.000.000	99,62%
6.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	3.664.663.245	3.346.607.800	91,32%
	JUMLAH	8.445.581.245	7.849.125.210	92,94%

Realisasi anggaran selama tahun 2019 di lakukan secara efektif, efisien, ekonomis dan transparan serta bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan manfaat sesuai tujuan organisasi dengan realisasi

anggaran sebesar 92,94%, rincian anggaran dan realisasi anggaran tahun 2019 sebagai berikut :

Realisasi Renja Tahun 2019
Program dan kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi

No.	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Pagu Anggaran	%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.884.378.000	1.744.409.461	139.968.539	92,57%
1.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.000.000	167.529.454	72.470.546	69,80%
2.	Kegiatan Penyediaan Jasa administrasi keuangan	260.312.000	250.088.000	10.224.000	96,07%
3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	119.000.000	119.000.000	-	100%
4.	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	110.000.000	110.000.000	-	100%
5.	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000	50.000.000	-	100%
6.	Kegiatan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	70.000.000	70.000.000	-	100%
7.	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	90.000.000	33.020.000	56.980.000	36,69%
8.	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	15.066.000	15.066.000	-	100%
9.	Kegiatan Perjalanan Dinas	930.000.000	929.706.007	293.993	99,97%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.533.040.000	2.427.265.949	105.774.051	95,82%
1.	Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.151.500.000	1.151.500.000	-	100%
2.	Kegiatan Pengadaan Mebeleur	231.200.000	208.759.850	22.440.150	90,29%
3.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran	520.120.000	510.895.500	9.224.500	98,23%
4.	Kegiatan Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung kantor	65.000.000	52.138.000	12.862.000	80,21%
5.	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	240.720.000	181.938.599	58.781.401	75,58%

6.	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	174.500.000	172.295.000	2.205.000	98,74%
7.	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor	150.000.000	149.739.000	261,000	99,83%
III.	Program Peningkatan disiplin aparatur	58.500.000	51.000.000	7.500.000	87,18%
1.	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	58.500.000	51.000.000	7.500.000	87,18%
IV.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	40.000.000	15.842.000	24,158.000	39,61%
1.	Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	40.000.000	15.842.000	24,158.000	39,61%
V.	Program Pengembangan data/informasi	265.000.000	264.000.000	1.000.000	91,29%
1.	Kegiatan Pengembangan data/informasi	265.000.000	264.000.000	1.000.000	91,29%
VI	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	3.664.663.245	3.346.607.800	318.055.445	91,32%
1.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS)	1.604.109.245	1.435.746.300	168.362.945	89,50%
2.	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	413.950.000	387.031.000	26.919.000	93,50%
3.	Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Ekonomi	432.653.000	410.797.000	21.856.000	94,95%
4.	Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Sosbud dan Pemerintahan	334.100.000	275.871.000	58.229.000	82,57%
5.	Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Manusia dan Masyarakat	303.462.000	285.528.000	17.934.000	94,09%
6.	Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Survei Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	576.389.000	551.634.500	24.754.500	95,71%
JUMLAH ANGGARAN		8.445.581.245	7.849.125.210	596.456.035	92,94%

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dengan realisasi 92,94 % dimana terdapat silpa anggaran sebesar

Rp.596.456.035,-. Dimana tugas -tugas yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi diarahkan pada sasaran agar penetapan dokumen perencanaan pembangunan dapat sesuai dengan proses peraturan perundangan.

Untuk lebih rinci penggunaan anggaran tahun 2019 dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 240.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 167.529.454,- atau 69,80%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 240.000.000,-	Rp. 167.529.454,-
Keluaran	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	1 Jaringan Telepon, 50 m3, 3 Meteran (p1/6500 VA), 30 Mbps	1 Jaringan Telepon, 50 m3, 3 Meteran (p1/6500 VA), 30 Mbps
Hasil	Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	69,80%

b. Kegiatan Penyediaan Jasa administrasi keuangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 260.312.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 250.088.000,- atau 96,07%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 260.312.000,-	Rp. 250.088.000,-
Keluaran	Pengelolaan administrasi keuangan serta barang/jasa kegiatan kantor yang tertib sesuai	22 pegawai pengelola keuangan	22 pegawai pengelola keuangan

	peraturan yang berlaku		
Hasil	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	96,07%

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 119.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 119.000.000,- atau 100%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 119.000.000,-	Rp. 119.000.000,-
Keluaran	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	5 orang cleaning service beserta peralatan kebersihan	5 orang cleaning service beserta peralatan kebersihan
Hasil	Meningkatnya Kebersihan Kantor	100%	100%

d. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 110.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 110.000.000,- atau 100%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 110.000.000,-	Rp. 110.000.000,-
Keluaran	Terlaksananya Pengelolaan administrasi kantor dengan baik	1 tahun	1 tahun
Hasil	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%

e. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Keluaran	Terlaksananya Pengelolaan administrasi kantor	1 tahun	1 tahun
Hasil	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor	100%	100%

- f. Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 70.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 70.000.000,- atau 100%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 70.000.000,-	Rp. 70.000.000,-
Keluaran	Tersedianya barang komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	1 tahun
Hasil	Terlaksananya kegiatan pendukung kantor	100%	100%

- g. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 90.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.020.000,- atau 99,97%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 90.000.000,-	Rp. 33.020.000,-
Keluaran	Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat	1 tahun	1 tahun
Hasil	Terlaksananya pelayanan perkantoran	100%	36,69%.

- h. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.066.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.066.000,- atau 100%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 15.066.000,-	Rp. 15.066.000,-
Keluaran	Terlaksanya Jasa Pengamanan/Penjaga malam kantor	1 orang	1 orang
Hasil	Optimalnya kegiatan pelayanan perkantoran	100%	100%.

- i. Kegiatan Perjalanan Dinas

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 930.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 929.706.007,- atau 100%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 930.000.000,-	Rp. 929.706.007,-
Keluaran	Terlaksananya kegiatan Perjalanan Dinas	63 pegawai	63 pegawai
Hasil	Tercapainya pelaksanaan pendukung tupoksi	100%	99,97%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Kegiatan Pengadaan mebeleur

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 231.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 208.759.850,- atau 90,29%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 231.200.000,-	Rp. 208.759.850,-
Keluaran	Tersedianya mebeleur kantor	1 tahun	1 tahun

Hasil	Terwujudnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	100%	90,29%
-------	---	------	--------

b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Pekantoran

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 520.120.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 510.895.500,- atau 98,23%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 520.120.000,-	Rp. 510.895.500,-
Keluaran	Terlaksananya pengadaan penunjang kerja	7 PC, 7 notebook/tablet, 11 printer, 1 proyektor/infocus, 10 kamera pengawas (CCTV), 1 keyboard tablet, Mic Conference wireless, 4 SSD Portable dan 1 kamera drone	7 PC, 7 notebook/tablet, 11 printer, 1 proyektor/infocus, 10 kamera pengawas (CCTV), 1 keyboard tablet, Mic Conference wireless, 4 SSD Portable dan 1 kamera drone
Hasil	Terwujudnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	100%	98,23%

c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 65.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 52.138.000,- atau 80,21%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 65.000.000,-	Rp. 52.138.000,-
Keluaran	Terpeliharanya gedung kantor dan taman kantor	1 tahun	1 tahun
Hasil	Meningkatnya usia pakai gedung kantor dan taman kantor	100%	80,21%

d. Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.151.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.151.500.000,- atau 100%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 1.151.500.000,-	Rp. 1.151.500.000,-
Keluaran	Tersedianya kendaraan dinas/operasional untuk penunjang kegiatan kantor	4 unit kendaraan roda empat dan 9 unit kendaraan roda dua	4 unit kendaraan roda empat dan 9 unit kendaraan roda dua
Hasil	Terwujudnya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	100%

e. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 240.720.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 181.938.599,- atau 75,58%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 240.720.000,-	Rp. 181.938.599,-
Keluaran	Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan STNK kendaraan dinas yang terpakai	7 mobil dan 16 motor	7 mobil dan 16 motor
Hasil	Lancarnya mobilitas kantor	100%	75,58%.

f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 174.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.172.295.000,- atau 98,74%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 174.500.000,-	Rp. 172.295.000,-
Keluaran	Terpeliharanya peralatan kantor	1 tahun	1 tahun
Hasil	Meningkatnya usia pakai peralatan kantor	100%	98,74%

g. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.149.739.000,- atau 99,83%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 150.000.000,-	Rp. 149.739.000,-
Keluaran	Terlaksananya rehab kantor Bappeda Kota Jambi	1 tahun	1 tahun
Hasil	Terpeliharanya serta bertambahnya usia pakai gedung kantor Bappeda Kota Jambi	100%	99,83%

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 58.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 51.000.000,- atau 87,18%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 58.500.000,-	Rp. 51.000.000,-
Keluaran	Pakaian dinas pegawai (PDH dan PSR)	70 stel dan 6 stel	70 stel dan 6 stel
Hasil	Terwujudnya keseragaman berpakaian dinas	100%	87,18%

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.842.000,- atau 39,61%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 40.000.000,-	Rp. 15.842.000,-
Keluaran	Pegawai yang diutus untuk mengikuti Bimtek	5 pegawai	5 pegawai

Hasil	Peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan pegawai	100%	39,61%
-------	---	------	--------

5. Program Pengembangan Data / Informasi

a. Kegiatan Pengembangan Data / Informasi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 265.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 264.000.000,- atau 99,62%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 265.000.000,-	Rp. 264.000.000,-
Keluaran	Tersedianya aplikasi perencanaan dan Website	3 aplikasi dan 1 website	3 aplikasi dan 1 website
Hasil	Tersedianya dat dan informasi yang digunakan untuk perencanaan pembangunan	100%	99,62%

6. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

a. Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.604.109.245,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.435.746.300,- atau 89,50%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 1.604.109.245,-	Rp 1.435.746.300,-
Keluaran	Tersedianya RKPD Kota Jambi, RPJMD 2018-2023, KUA dan PPAS (Murni dan Perubahan) dan Ranwal RKPD 2021	7 dokumen	7 dokumen
Hasil	Persentase kesesuaian Capaian Kinerja terhadap target kinerja	100%	89,50%

	program pembangunan daerah		
--	----------------------------	--	--

- b. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 413.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 387.031.000,- atau 93,50%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 413.950.000,-	Rp 387.031.000,-
Keluaran	Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan, evaluasi pengendalian DAK, Laporan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), Kimpulan Pidato	4 dokumen	4 dokumen
Hasil	Persentase kesesuaian Capaian Kinerja terhadap target kinerja program pembangunan daerah	100%	93,50%

- c. Kegiatan Perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan bidang ekonomi
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 432.653.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 410.797.000,- atau 94,95%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 432.653.000,-	Rp 410.797.000,-
Keluaran	- Terlaksananya rakor bidang ekonomi dan SDA - Tersusunnya kajian/dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi/SDA	10 urusan dan 6 dokumen	10 urusan dan 6 dokumen
Hasil	Persentase kesesuaian Capaian Kinerja terhadap target kinerja	100%	94,95%

	program pembangunan daerah		
--	----------------------------	--	--

- d. Kegiatan Perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan bidang Sosbud dan Pemerintahan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 334.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 275.871.000,- atau 82,57%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 334.100.000,-	Rp 275.871.000,-
Keluaran	- Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan sosbud - Jumlah kajian dokumen perencanaan	- 1 tahun, 3 kali, 1 tahun - 4 dokumen	- 1 tahun, 3 kali, 1 tahun - 4 dokumen
Hasil	Persentase kesesuaian Capaian Kinerja terhadap target kinerja program pembangunan daerah	100%	82,57%

- e. Kegiatan Perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan manusia dan masyarakat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 303.462.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 285.528.000,- atau 94,09%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 303.462.000,-	Rp 285.528.000,-
Keluaran	- Terlaksananya rakor bidang pembangunan manusia dan masyarakat - Tersusunnya kajian di bidang pembangunan manusia dan masyarakat	15 urusan dan 3 dokumen	15 urusan dan 3 dokumen
Hasil	Persentase kesesuaian Capaian Kinerja terhadap	100%	94,09%

	target kinerja program pembangunan daerah		
--	---	--	--

- f. Kegiatan Perencanaan, koordinasi dan survei pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 576.389.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 551.634.500,- atau 95,71%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 576.389.000,-	Rp 551.634.500,-
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya koordinasi/ supervisi/ monitoring perencanaan pembangunan mitra kerja, stakeholder dan Pemerintah Prov/pusat bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah - Jumlah kajian/dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah 	10 urusan dan 4 dokumen	10 urusan dan 4 dokumen
Hasil	Persentase kesesuaian Capaian Kinerja terhadap target kinerja program pembangunan daerah	100%	95,71%

Sasaran pembangunan dan pelayanan yang telah dicapai adalah :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana kantor yang memadai melalui kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM yang profesional sesuai dengan bidang pekerjaannya melalui kegiatan bimbingan teknis.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui *e-planning*.
4. Meningkatnya realisasi capaian indikator sasaran RPJMD.

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dengan realisasi 92,94%, dimana terdapat 10.18 % sisa anggaran yang merupakan kelebihan dan serta efisiensi dari penggunaan

anggaran yang dilaksanakan, namun demikian dengan realisasi anggaran tersebut telah dapat memenuhi tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Dimana tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Jambi diarahkan melaksanakan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan. Untuk peningkatan masa yang akan datang Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diantaranya adalah :

1. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan.
2. Meningkatkan SDM Perencanaan melalui Diklat perencanaan.
3. Memperkuat Koordinasi antar lembaga pemerintahan.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan melalui sosialisasi *e-planning*.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan
Pencapaian Renstra Bappeda s/d Tahun 2020 (Tahun berjalan)*
Kota Jambi

BAPPEDA KOTA JAMBI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2019	Tingkat Realisasi (%)	2020	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PERENCANAAN										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet kantor	240.000.000	189.468.357	240.000.000	167.529.454	69,8%	-	356.997.811	1,49%
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertatanya administrasi keuangan serta barang/jasa kantor	260.312.000	297.596.808	260.312.000	250.088.000	96,1%	-	547.684.808	2,10%
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan kantor	119.000.000	116.600.000	119.000.000	119.000.000	100%	-	235.600.000	1,98%
4	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor	110.000.000	61.628.000	110.000.000	110.000.000	100%	-	171.628.000	1,56%

	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor	50.000.000	55.000.000	50.000.000	50.000.000	100%	-	105.000.000	2,1%
	6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya kegiatan pendukung kantor	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	100%	-	140.000.000	2%
	7	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya pelayanan kantor	90.000.000	70.625.000	90.000.000	33.020.000	36,7%	95.000.000	198.645.000	2,21%
	8	Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubakti dan penjaga malam	Optimalnya kegiatan pelayanan kantor	15.066.000	9.610.000	15.066.000	15.066.000	100%	-	24.676.000	1,64%
	9	Perjalanan Dinas	Tercapainya pelaksanaan pendukung tupoksi	930.000.000	1.079.174.644	930.000.000	929.706.007	99,9%	1.000.000.000	3.008.880.651	3,24%
2		Program peningkatan sarana & prasarana aparatur									
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional untuk penunjang kegiatan kantor	1.151.500.000	-	1.151.500.000	1.151.500.000	100%	-	-	-
	2	Pengadaan mebeleur	Meningkatnya ketersediaan mebeleur	68.000.000	96.842.000	231.200.000	208.759.850	90,3%	-	305.601.850	4,50%
	3	Pengadaan peralatan perkantoran	Meningkatnya ketersediaan peralatan perkantoran	520.120.000	345.285.000	520.120.000	510.895.500	98,2%	-	856.180.500	1,65%
	4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya usia pakai gedung kantor dan taman kantor	65.000.000	44.781.000	65.000.000	52.138.000	80,2%	-	96.919.000	1,49%
	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Lancarnya mobilitas kantor	240.720.000	231.851.064	240.720.000	181.938.599	75,6%	-	413.789.663	1,72%
	6	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Meningkatnya usia pakai peralatan kantor	174.500.000	173.440.000	174.500.000	172.295.000	98,7%	-	345.735.000	1,98%

	7	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya serta bertambahnya usia pakai gedung kantor Bappeda Kota Jambi	150.000.000	209.230.000	150.000.000	149.739.000	99,8%	-	358.969.000	2,39%
3	Program peningkatan disiplin aparatur										
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas	58.500.000	37.000.000	58.500.000	51.000.000	87,2%	75.000.000	163.000.000	2,79%
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur										
	1	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Pengetahuan, kemampuan dan keterampilan pegawai	40.000.000	31.730.060	40.000.000	15.842.000	39,6%	-	47.572.060	1,19%
5	Program Pengembangan Data/Informasi										
	1	Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data & informasi yang digunakan untuk perencanaan pembangunan	265.000.000	45.000.000	265.000.000	264.000.000	99,6%	-	309.000.000	1,17%
6	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan										
	1	Penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS)	Terciptanya dokumen perencanaan Kota Jambi Tahun 2018	1.604.109.245	999.802.400	1.604.109.245	1.435.746.300	89,5%	-	2.435.548.700	1,52%
	2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan rencana pembangunan daerah	Terkendalinya & Terevaluasinya kegiatan yang dilaksanakan sesuai PP No. 39/2006 dan permendagri 54/2010	413.950.000	338.112.545	413.950.000	387.031.000	93,5%	-	725.143.545	1,75%
	3	Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Ekonomi	Meningkatnya Koordinasi bidang ekonomi dan tersedianya informasi pembangunan ekonomi	432.653.000	395.930.704	432.653.000	410.797.000	95%	-	806.727.704	1,86%

	4	Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Sosbud dan Pemerintahan	Tersedianya dokumen perencanaan Kota Jambi 2018	334.100.000	254.573.451	334.100.000	275.871.000	82,6%	-	530.444.451	1,59%
	5	Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Meningkatnya kualitas perencanaan bidang pembangunan manusia dan masyarakat	303.462.000	356.408.000	303.462.000	285.528.000	94,1%	-	641.936.000	2,12%
	6	Perencanaan, Koordinasi dan Survei Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Meningkatnya kualitas perencanaan infrastruktur wilayah berbasis tata ruang	576.389.000	541.245.201	576.389.000	551.634.500	95,7%	-	1.092.879.701	1,90%
	Tahun 2020										
	PENUNJANG URUSAN										
1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran										
	1	Penyediaan jasa surat menyurat dan Perizinan	Terwujudnya tertib administrasi kendaraan	-	-	-	-	-	25.000.000		
	2	Penyediaan jasa dan Komponen/ Instalasi Telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Komponen/ Instalasi Telekomunikasi, sumber daya air dan listrik						310.000.000		
	3	Penyediaan jasa administrasi keuangan dan Aset	Tertatanya administrasi keuangan serta barang/jasa kantor						260.312.000		

	4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran						602.668.000		
	5	Penyediaan alat tulis kantor, Barang Cetak dan Penggandaan							120.000.000		
	6	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya pelayanan kantor	90.000.000	70.625.000	90.000.000	33.020.000	36,7%	95.000.000	198.645.000	2,21%
	7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor							286.5000.000		
	8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional							276.720.000		
	9	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor							199.000.000		
2		Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
	1	Pengadaan pakaian dinas dan hari-hari tertentu beserta perlengkapannya	Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas						75.000.000		
	2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus							481.760.000		
	3	Perjalanan Dinas	Tercapainya pelaksanaan pendukung tupoksi	930.000.000	1.079.174.644	930.000.000	929.706.007	99,9%	1.000.000.000	3.008.880.651	3,24%

3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah										
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan							15.000.000		
	2	Penyusunan Laporan Keuangan							20.000.000		
	3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	Tersedianya data & informasi yang digunakan untuk perencanaan pembangunan						355.900.000		
	PERENCANAAN										
4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan										
	1	Penyusunan dokumen perencanaan daerah							928.500.000		
	2	Monitoring dan Evaluasi							245.000.000		
	3	Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur							251.400.000		
	4	Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pembangunan Ekonomi							176.000.000		
	5	Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							378.075,000		
5	Program Penelitian dan Pengembangan										

1	Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Infrastruktur dan Sosial Budaya							588.665.000		
2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi							91.500.000		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bappeda Kota Jambi sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kota yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*welfare state*).

Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 14, ayat (1), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA, yaitu:

1. Pasal 10, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah”;
2. Pasal 11, ayat (3): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;
3. Pasal 12, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;
4. Pasal 14, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah”;
5. Pasal 15, ayat (4): “Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD”;

6. Pasal 16, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah”;
7. Pasal 18, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah”.
8. Pasal 20, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah”;
9. Pasal 21, ayat (4) : “Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA-SKPD”;
10. Pasal 22, ayat (4) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD”;
11. Pasal 24, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang”;
12. Pasal 28, ayat (2) : “Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD”; 13. Pasal 29, ayat (3): “Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kota Jambi didukung ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran, program dan kegiatan, peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, antar Kabupaten/Kota dan Provinsi maupun Pusat. Berikut ini Tabel 2.2 mengenai pencapaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET RENSTRA TAHUN KE					REALISASI TAHUN KE					PROYEKSI	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022
1	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	21,85	22,01	22,17	22,33	22,49	21,85	-	-	-	-	-	-
2	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	15,75	15,90	16,05	16,20	16,35	15,75	-	-	-	-	-	-
3	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	123,25	-	-	-	-	-	-
4	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Bappeda Kota Jambi memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi tahun 2019 sangat baik, capaian per 31 Desember 2019 sesuai dengan target yang telah ditetapkan dimana kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi berdasarkan target

kinerja yang ditetapkan baik itu melalui Perjanjian Kinerja maupun melalui Indikator Kinerja Utama.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, adalah Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal, disebabkan kurangnya kapasitas SDM perencana. Banyaknya amanat pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan multisektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program Nasional/ Internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*)

Pencapaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam hal Perencanaan akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Nilai Sakip Kota Jambi sesuai target yang di tetapkan.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain:

1. Perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Belum optimalnya pemahaman di bidang perencanaan;
3. Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD;

Peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

- 1) Dukungan dan komitmen dari stakeholder pembangunan baik pemerintah, masyarakat, Perguruan Tinggi serta dunia usaha;
- 2) Adanya arahan yang jelas tentang kebijakan pembangunan Kota Jambi dari Kepala Daerah yaitu visi misi Kota Jambi Tahun 2018-2023;

- 3) Adanya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan;
- 4) Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

- 1) Pembangunan sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.
- 2) Peningkatan Kualitas SDM Perencana dengan mengikuti pendidikan dan Pelatihan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Review ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel T-C.31. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
KOTA JAMBI**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah					Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Bappeda Kota Jambi	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	4 dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Bappeda Kota Jambi	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	4 dokumen	15.000.000	
2	Penyusunan Laporan Keuangan	Bappeda Kota Jambi	Dokumen Pelaporan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	6 dokumen	15.000.000	Penyusunan Laporan Keuangan	Bappeda Kota Jambi	Dokumen Pelaporan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	6 dokumen	15.000.000	
3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	Bappeda Kota Jambi	Aplikasi/ Dokumen/ buku	Aplikasi/ Dokumen/ buku	300.000.000	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	Bappeda Kota Jambi	Aplikasi/ Dokumen/ buku	Aplikasi/ Dokumen/ buku	300.000.000	
	Program Pelayanan Administrasi Dan Sarana Prasarana Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Dan Sarana Prasarana Perkantoran					

1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	Bappeda Kota Jambi	Jumlah STNK/KIR	Pembayaran pajak 7 unit kendaraan roda 4 dan 16 unit kendaraan roda 2	27.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	Bappeda Kota Jambi	Jumlah STNK/KIR	Pembayaran pajak 7 unit kendaraan roda 4 dan 16 unit kendaraan roda 2	27.500.000
2	Penyediaan Jasa dan Komponen / Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Bappeda Kota Jambi	Jasa sumber daya listrik, jasa sumber daya air, jasa sumber daya telekomunikasi, Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	listrik: 20000 KWH (3 meteran), PDAM: 50 M3, Telekomunikasi 100 Mbp, Komponen/instalasi : 1 tahun	320.000.000	Penyediaan Jasa dan Komponen / Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Bappeda Kota Jambi	Jasa sumber daya listrik, jasa sumber daya air, jasa sumber daya telekomunikasi, Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	listrik: 20000 KWH (3 meteran), PDAM: 50 M3, Telekomunikasi 100 Mbp, Komponen /instalasi : 1 tahun	320.000.000
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	Bappeda Kota Jambi	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa	26 Orang	265.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	Bappeda Kota Jambi	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa	26 Orang	265.000.000
4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	25 Orang	684.274.000	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	25 Orang	684.274.000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Bappeda Kota Jambi	Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan penggandaan	1 Tahun	125.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Bappeda Kota Jambi	Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan penggandaan	1 Tahun	125.000.000
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bappeda Kota Jambi	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu serta harian	12 Bulan	100.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bappeda Kota Jambi	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu serta harian	12 Bulan	100.000.000

7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	Bappeda Kota Jambi	Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor	2 Unit AC, 2 unit PC, 1 unit Notebook, 2 printer, 2 unit kulkas dan pemeliharaan 1 tahun	330.000.000	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	Bappeda Kota Jambi	Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor	2 Unit AC, 2 unit PC, 1 unit Notebook, 2 printer, 2 unit kulkas dan pemeliharaan 1 tahun	330.000.000
8	Perjalanan Dinas	Bappeda Kota Jambi	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	152 Kali	1.100.000.000	Perjalanan Dinas	Bappeda Kota Jambi	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	152 Kali	1.100.000.000
9	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan / Dinas Operasional	Bappeda Kota Jambi	Pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi dan bahan bakar kendaraan dinas	2 unit motor dan 16 unit motor/tahun serta 7 unit mobil/tahun	240.000.000	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan / Dinas Operasional	Bappeda Kota Jambi	Pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi dan bahan bakar kendaraan dinas	2 unit motor dan 16 unit motor/tahun serta 7 unit mobil/tahun	240.000.000
10	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	Bappeda Kota Jambi	Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	1 Tahun	240.000.000	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	Bappeda Kota Jambi	Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	1 Tahun	240.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Hari-hari tertentu	Bappeda Kota Jambi	PSL/PSH/PDH/PSR/OLAHRAGA/TELUK BELANGO	72 stel dan 6 stel	110.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas dan Hari-hari tertentu	Bappeda Kota Jambi	PSL/PSH/PDH/PSR/OLAHRAGA/TELUK BELANGO	72 stel dan 6 stel	110.000.000
2	Pendidikan dan pelatihan / bimtek / kursus	Bappeda Kota Jambi	Diklat/Bimtek/Kursus	16 kali/tahun	60.000.000	Pendidikan dan pelatihan / bimtek / kursus	Bappeda Kota Jambi	Diklat/Bimtek/Kursus	16 kali/tahun	60.000.000

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan						Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen	7 dok	2.300.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen	7 dok	2.300.000.000	
2	Monitoring dan Evaluasi	Bappeda Kota Jambi	Rapat koordinasi dan jumlah laporan	10 kali dan 3 laporan	450.000.000	Monitoring dan Evaluasi	Bappeda Kota Jambi	Rapat koordinasi dan jumlah laporan	10 kali dan 3 laporan	450.000.000	
3	Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Bappeda Kota Jambi	- Terlaksananya Koordinasi/supervisi/monitoring perencanaan pembangunan mitra kerja, stakeholder dan pemerintah provinsi/pusat sub bidang infrastruktur, LH dan SDA - jumlah laporan	Tahun 11 urusan dan 1 laporan	400.000.000	Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Bappeda Kota Jambi	- Terlaksananya Koordinasi/supervisi/monitoring perencanaan pembangunan mitra kerja, stakeholder dan pemerintah provinsi/pusat sub bidang infrastruktur, LH dan SDA - jumlah laporan	Tahun 11 urusan dan 1 laporan	400.000.000	
4	Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Bappeda Kota Jambi	- Terlaksananya Koordinasi/supervisi/monitoring perencanaan pembangunan mitra kerja, stakeholder dan pemerintah provinsi/pusat sub bidang perekonomian - jumlah laporan	7 urusan, 1 laporan dan 1 dokumen	500.000.000	Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Bappeda Kota Jambi	- Terlaksananya Koordinasi/supervisi/monitoring perencanaan pembangunan mitra kerja, stakeholder dan pemerintah provinsi/pusat sub bidang perekonomian - jumlah laporan	7 urusan, 1 laporan dan 1 dokumen	500.000.000	
5	Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda Kota Jambi	- Rapat koordinasi - Supervisi mitra bidang pemerintahan dan	12 kali, 2 kali dan 2 dokumen	350.000.000	Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda Kota Jambi	- Rapat koordinasi - Supervisi mitra bidang pemerintahan dan	12 kali, 2 kali dan 2 dokumen	350.000.000	

			pembangunan manusia - jumlah kajian					pembangunan manusia - jumlah kajian			
	Program Penelitian dan Pengembangan					Program Penelitian dan Pengembangan					
1	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Bappeda Kota Jambi	- Rapat Koordinasi - Sosialisasi	10 kali dan 2 kali	100.000.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Bappeda Kota Jambi	- Rapat Koordinasi - Sosialisasi	10 kali dan 2 kali	100.000.000	
2	Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Infrastruktur dan Sosial Budaya	Bappeda Kota Jambi	- Rapat koordinasi penelitian dan pengembangan - Jumlah Kajian	10 kali dan 4 dokumen	300.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Infrastruktur dan Sosial Budaya	Bappeda Kota Jambi	- Rapat koordinasi penelitian dan pengembangan - Jumlah Kajian	10 kali dan 4 dokumen	300.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Renja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum OPD. Pada Forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku OPD, baik dari kelompok masyarakat, LSM maupun perguruan tinggi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “Nawa Cita”, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dengan demikian Arah kebijakan pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi Periode 2018 – 2023 yang memuat 5 misi, 6 tujuan dan 18 sasaran dalam mewujudkan pencapaian sehingga diperlukan prioritas dan sinkronisasi efektifitas agenda pembangunan daerah sesuai tujuan dari renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan.

Implementasi arah kebijakan pembangunan Kota Jambi Tahun 2018-2023 diuraikan dalam program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai urusan pemerintahan daerah, kewenangan daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana pembangunan daerah.

Penetapan kebijakan dan program-program Bappeda Kota Jambi pada hakekatnya merupakan upaya berkelanjutan dari kebijakan dan program yang telah dilaksanakan sebelumnya, dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian kebijakan dan program sesuai dengan amanat RPJMD Kota Jambi 2018-2023.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi disesuaikan dengan arah dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2021 yang merupakan bagian dari tahapan pembangunan jangka menengah 2018-2023. Sebelum sampai kepada arah kebijakan terlebih dahulu ditetapkan tujuan, sasaran dan strategi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan :

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 tahun kedepan.

Berdasarkan uraian di atas, maka BAPPEDA menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Misi RPJMD Kota Jambi 2018-2023, yaitu, "Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan". Dengan Indikator Tujuan yaitu Nilai Capaian Perencanaan dan Pengukuran Kinerja.

3.2.2 Sasaran :

Sasaran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi adalah merupakan gambaran dari pencapaian tujuan organisasi dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Sasaran juga merupakan gambaran terhadap sesuatu hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk pencapaian tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan mampu dirumuskan penyusunan program dan kegiatan yang dirinci dan terukur dalam pencapaiannya. Bertitik tolak dari tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai dalam rangka mengemban misi dari organisasi adalah :

1. Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan
3. Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang Dalam Pembangunan Daerah.

Strategi :

Strategi yang akan ditetapkan dalam memenuhi sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peranan Bappeda dalam perencanaan, evaluasi dan pengendalian penganggaran

2. Memanfaatkan database pembangunan dalam pengembangan sinergitas pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta dan dunia usaha
3. Meningkatkan kualitas pekerjaan dan peran serta fungsi Bappeda dalam setiap perencanaan pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang baik.

Strategi tersebut akan dicapai dengan menetapkan arah kebijakan yang akan dilaksanakan yaitu :

1. SPM perencanaan dalam penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui monitoring turun ke lapangan.
2. Peningkatan kualitas dan penyediaan data dan analisis indikator pembangunan
3. Peningkatan hasil evaluasi RKPD
4. Peningkatan verifikasi kesesuaian target Renja Perangkat Daerah terhadap target prioritas RKPD
5. Peningkatan peran dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan
6. Peningkatan fokus pembangunan pada program yang bersifat holistik, tematik, integratif dan spasial.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

MISI ke 1	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	1. Nilai Capaian Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	1. Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan 2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan 3. Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	1. Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja 2. Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja 1. Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD 1. Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan

3.3 Program dan Kegiatan

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, Dalam mewujudkan Visi Kota Jambi tahun 2013-2018 Yaitu ***Menjadikan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak Dan Berbudaya Dengan Mengedepankan Pelayanan Prima*** dimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi berada dalam Bidang Pemerintahan Misi ke Satu yaitu ***Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi***. Untuk menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, Pemerintah Kota Jambi menetapkan sasaran pokok penguatan tata kelola dan birokrasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat meningkat secara maksimal.

Dalam pencapaian misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab Urusan Perencanaan, dengan Program Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan indikator program adalah kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah dengan target capaian 100%.

2. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan.

Program/Kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program prioritas, indikator kinerja program/kegiatan, tahun indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap pada matrik rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi. Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2021 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah. Disamping arahan umum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 tahapan pembangunan ketiga tahun 2016-2021 dan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 RKP tahun 2016; serta memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2021 pemerintah Kota Jambi. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2021 disusun berdasarkan analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kota Jambi. Untuk tahun 2021 program dan kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program-program ini merupakan pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai Tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi.

Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan.

Dari uraian tersebut di atas secara rinci Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dapat diuraikan sebagai mana tabel TC-33

Penjelasan ketidak sesuaian program dan kegiatan

Ketidak sesuaian rumusan program dan kegiatan dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/Kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya terjadi manakala ada kebijakan baru setelah rancangan awal RKPD disusun, baik kebijakan Nasional maupun kebijakan Daerah atau dalam keadaan porce majeure.

Dari program tersebut diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan

sebagai mana tercantum secara rinci dengan pendanaannya pada tabel
TC.33

Tabel T-C.33. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Bappeda Kota Jambi	100%	7,209,742,896	APBD		1 tahun	10,510,933,287
1.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Bappeda Kota Jambi	82	378,000,000	APBD		1 tahun	434,700,000
	01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda Kota Jambi	2 dokumen	10,500,000	APBD		1 tahun	12,075,000
	02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Bappeda Kota Jambi	4 dokumen	13,300,000	APBD		1 tahun	15,295,000
	03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Bappeda Kota Jambi	4 dokumen	26,950,000	APBD		1 Tahun	32,142,500
	04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda Kota Jambi	2 dokumen	327,250,000	APBD		1 Tahun	375,187,500

2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi Keuangan	Bappeda Kota Jambi	100%	4,255,242,896	APBD		1 Tahun	4,430,820,165
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda Kota Jambi	12 Bulan	4,090,242,896	APBD		1 Tahun	4,241,070,165
	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bappeda Kota Jambi	1 Tahun	90,000,000	APBD		1 tahun	103,500,000
	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah DokumenBahan Pelaksanaan Verifikasi	Bappeda Kota Jambi	1 Tahun	5,000,000	APBD		1 tahun	5,750,000
	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Bappeda Kota Jambi	1 Tahun	20,000,000	APBD		1 Tahun	23,000,000
	05	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappeda Kota Jambi	1 Tahun	10,000,000	APBD		1 Tahun	11,500,000
	06	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Bappeda Kota Jambi	14 Dokumen	20,000,000	APBD		1 Tahun	23,000,000
	07	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Bappeda Kota Jambi	12 Laporan	10,000,000	APBD		1 tahun	11,500,000
	08	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Bappeda Kota Jambi	1 Laporan	10,000,000	APBD		1 tahun	11,500,000
3.		Administrasi Umum	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	Bappeda Kota Jambi	100%	2,270,000,000	APBD		1 tahun	2,610,500,000
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	Bappeda Kota Jambi	12 Bulan	35,000,000	APBD		1 Tahun	40,250,000
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Jumlah Jasa Listrik Jumlah Jasa Sumber Daya Air	Bappeda Kota Jambi	100 Mbps 20000 KWH 50 M3	265,000,000	APBD		1 tahun	304,750,000

03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK/KIR	Bappeda Kota Jambi	23 Unit	30,000,000	APBD		1 tahun	34,500,000
04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa	Bappeda Kota Jambi	6 orang	320,000,000	APBD		1 tahun	368,000,000
05	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	Bappeda Kota Jambi	5 orang	133,000,000	APBD		1 tahun	172,500,000
06	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Bappeda Kota Jambi	1 Tahun	50,000,000	APBD		1 tahun	57,500,000
07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK	Bappeda Kota Jambi	1 Tahun	70,000,000	APBD		1 tahun	80,500,000
08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	Bappeda Kota Jambi	1 Tahun	50,000,000	APBD		1 tahun	57,500,000
09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda Kota Jambi	1 Tahun	70,000,000	APBD		1 tahun	80,500,000
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda Kota Jambi	1 Tahun	120,000,000	APBD		1 tahun	138,000,000
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	Bappeda Kota Jambi	100 %	5,000,000	APBD		1 tahun	5,750,000
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	Bappeda Kota Jambi	12 Bulan	100,000,000	APBD		1 tahun	115,000,000
13	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bappeda Kota Jambi	12 Bulan	500,000,000	APBD		1 tahun	
14	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Bappeda Kota Jambi	2 Unit	0	APBD		1 tahun	0

	15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Bappeda Kota Jambi	12 Bulan	10,000,000	APBD		1 tahun	11,500,000
	16	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Bappeda Kota Jambi	12 Bulan	0	APBD		1 tahun	0
	17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bappeda Kota Jambi	12 Bulan	82,000,000	APBD		1 tahun	74,750,000
	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	umlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bappeda Kota Jambi	12 Bulan	260,000,000	APBD		1 tahun	299,000,000
	19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Bappeda Kota Jambi	12 Bulan	10,000,000	APBD		1 tahun	11,500,000
	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Bappeda Kota Jambi	12 Bulan	110,000,000	APBD		1 tahun	126,500,000
	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Bappeda Kota Jambi	12 Bulan	50,000,000	APBD		1 tahun	57,500,000
4.		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Bappeda Kota Jambi	65 Nilai	306,500,000	APBD		1 tahun	352,475,000
	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Bappeda Kota Jambi	12 Bulan	7,500,000	APBD		1 tahun	8,625,000
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Bappeda Kota Jambi	12 Bulan	0	APBD		1 tahun	0
	03	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	Bappeda Kota Jambi	12 Bulan	0	APBD		1 tahun	0
	04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Bappeda Kota Jambi	12 Bulan	49,000,000	APBD		1 tahun	56,350,000

	05	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bappeda Kota Jambi	12 Bulan	0	APBD		1 tahun	0
	06	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappeda Kota Jambi	12 Bulan	250,000,000	APBD		1 tahun	287,500,000
II		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda Kota Jambi	100%	1,444,393,000	APBD		1 tahun	1,655,296,992
1.		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Daerah	Bappeda Kota Jambi	100%	1,102,608,620	APBD		1 tahun	1,262,244,956
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Bappeda Kota Jambi	2 dokumen	293,371,015	APBD		1 tahun	337,376,667
	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi	Bappeda Kota Jambi	2 kali	0	APBD		1 tahun	0
	03	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi	Bappeda Kota Jambi	1 Kali	525,649,325	APBD		1 tahun	598,741,767
	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi	Bappeda Kota Jambi	1 Kali	13,826,640	APBD		1 tahun	15,900,636

	05	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Jumlah dokumen yang diintegrasikan	Bappeda Kota Jambi	5 Dokumen	10,261,640	APBD		1 tahun	11,800,886
	06	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah OPD produsen data	Bappeda Kota Jambi	39 OPD	147,500,000	APBD		1 tahun	169,625,000
	07	Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data	Bappeda Kota Jambi	1 Dokumen	62,000,000	APBD		1 tahun	71,300,000
	08	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pengumpulan dan analisis data	Bappeda Kota Jambi	1 kali	50,000,000	APBD		1 tahun	57,500,000
2.		Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya koordinasi Perencanaan Daerah	Bappeda Kota Jambi	100%	76,784,380	APBD		1 tahun	88,302,036
	01	Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah	Jumlah koordinasi	Bappeda Kota Jambi	2 kali	11,872,990	APBD		1 tahun	13,653,938
	02	Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Jumlah analisa	Bappeda Kota Jambi	2 dokumen	64,911,390	APBD		1 tahun	74,648,098
3.		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda Kota Jambi	100%	265,000,000	APBD		1 tahun	304,750,000

	01	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Monev	Bappeda Kota Jambi	4 triwulan	27,000,000	APBD		1 tahun	31,050,000
	02	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	Jumlah OPD yang dievaluasi	Bappeda Kota Jambi	39 opd	19,000,000	APBD		1 tahun	21,850,000
	03	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah urusan yang terkait SPM	Bappeda Kota Jambi	6 urusan	23,000,000	APBD		1 tahun	26,450,000
	04	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen	Bappeda Kota Jambi	4 Dokumen	196,000,000	APBD		1 tahun	225,400,000
III		PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase Peningkatan kinerja Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manus	Bappeda Kota Jambi	100%	800,444,200	APBD		1 tahun	434,786,250
1.		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Bappeda Kota Jambi	100%	105,000,000	APBD		1 tahun	108,100,000
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Rapat Koordinasi	Bappeda Kota Jambi	12 Kali	78,170,000	APBD		1 tahun	9,281,000
	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Supervisi Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda Kota Jambi	2 Kali	12,890,000	APBD		1 tahun	14,018,500

	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Monev terhadap Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda Kota Jambi	2 Kali	13,940,000	APBD		1 tahun	14,800,500
2.		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Bappeda Kota Jambi	100%	243,158,000	APBD		1 tahun	14,800,500
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rapat Koordinasi	Bappeda Kota Jambi	15 Kali	213,581,400	APBD		1 tahun	110,105,485
	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Asistensi	Bappeda Kota Jambi	12 Kali	16,276,600	APBD		1 tahun	14,727,015
	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Monev	Bappeda Kota Jambi	12 Kali	13,300,000	APBD		1 tahun	13,167,500
3.		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Bappeda Kota Jambi	100%	452,286,200	APBD		1 tahun	188,686,250

	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Rapat Koordinasi	Bappeda Kota Jambi	12 Kali	386,800,000	APBD		1 tahun	156,486,250
	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Asistensi	Bappeda Kota Jambi	12 Kali	37,486,200	APBD		1 tahun	18,400,000
	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Monev	Bappeda Kota Jambi	12 Kali	28,000,000	APBD		1 tahun	13,800,000
IV		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase Peningkatan kinerja Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bappeda Kota Jambi	100%	131,600,000	APBD		1 tahun	151,340,000
1.		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	ersentase Peningkatan kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian	Bappeda Kota Jambi	100%	60,700,000	APBD		1 tahun	69,805,000
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Jumlah Koordinasi perencanaan bidang Perekonomian	Bappeda Kota Jambi	5 kali	39,350,000	APBD		1 tahun	45,252,500

	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Jumlah Asistensi Perencanaan Bidang Perekonomian	Bappeda Kota Jambi	3 kali	10,500,000	APBD		1 tahun	12,075,000
	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Jumlah Monev Perencanaan Bidang Perekonomian	Bappeda Kota Jambi	2 kali	10,850,000	APBD		1 tahun	12,477,500
2.		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan kinerja Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	Bappeda Kota Jambi	100%	46,700,000	APBD		1 tahun	53,705,000
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	Bappeda Kota Jambi	5 kali	27,000,000	APBD		1 tahun	31,050,000
	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Asistensi perencanaan bidang Bidang Ekonomi	Bappeda Kota Jambi	3 kali	10,500,000	APBD		1 tahun	12,075,000
	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Monev perencanaan bidang Bidang Ekonomi Kreatif	Bappeda Kota Jambi	2 kali	9,200,000	APBD		1 tahun	10,580,000

3.		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan kinerja Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	Bappeda Kota Jambi	100%	24,200,000	APBD		1 tahun	27,830,000
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Koordinasi perencanaan bidang Bidang Sumber Daya	Bappeda Kota Jambi	5 kali	24,200,000	APBD		1 tahun	27,830,000
	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah asistensi	Bappeda Kota Jambi	3 kali	0	APBD		1 tahun	0
V		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Persentase Peningkatan kinerja Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	Bappeda Kota Jambi	100%	383,491,200	APBD		1 tahun	441,014,880
1.		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan kinerja Perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup	Bappeda Kota Jambi	100%	61,200,000	APBD		1 tahun	70,380,000
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup	Bappeda Kota Jambi	5 kali	40,300,000	APBD		1 tahun	46,345,000

	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah Asistensi perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup	Bappeda Kota Jambi	3 kali	10,500,000	APBD		1 tahun	12,075,000
	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah Monev perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup	Bappeda Kota Jambi	2 kali	10,400,000	APBD		1 tahun	11,960,000
2.		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Persentase Peningkatan kinerja Perencanaan bidang KeBinamargaan dan Perhubunga	Bappeda Kota Jambi	100%	75,980,400	APBD		1 tahun	87,377,460
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	umlah Koordinasi perencanaan bidang KeBinamargaan dan Perhubungan	Bappeda Kota Jambi	5 kali	55,080,400	APBD		1 tahun	63,342,460
	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Jumlah Asistensi perencanaan bidang KeBinamargaan dan Perhubungan	Bappeda Kota Jambi	3 kali	10,500,000	APBD		1 tahun	12,075,000
	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Jumlah Monev perencanaan bidang KeBinamargaan dan Perhubungan	Bappeda Kota Jambi	2 kali	10,400,000	APBD		1 tahun	11,960,000

3.		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	Persentase Peningkatan kinerja Perencanaan bidang keciptakarya dan kewilayahan	Bappeda Kota Jambi	100%	246,310,800	APBD		1 tahun	283,257,420
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	Jumlah Koordinasi perencanaan bidang keciptakarya dan kewilayahan	Bappeda Kota Jambi	5 kali	176,310,800	APBD		1 tahun	202,757,420
	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	Jumlah asistensi perencanaan bidang keciptakarya dan kewilayahan	Bappeda Kota Jambi	3 kali	10,500,000	APBD		1 tahun	12,075,000
	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciaptakarya dan Kewilayahan	Jumlah Monev Perencanaan Bidang Keciaptakarya dan kewilayahan	Bappeda Kota Jambi	2 kali	59,500,000	APBD		1 tahun	68,425,000
VI		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	Bappeda Kota Jambi	100%	745,571,600	APBD		1 tahun	819,457,340
1.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Bappeda Kota Jambi	100%	233,141,200	APBD		1 tahun	233,141,200

	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah fasilitasi/koordinasi	Bappeda Kota Jambi	100%	212,141,200	APBD		1 tahun	243,962,380
	02	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Aplikasi kelitbangan	Bappeda Kota Jambi	1 Aplikasi	21,000,000	APBD		1 tahun	21,000,000
2.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Bappeda Kota Jambi	30%	70,250,000	APBD		1 tahun	42,837,500
	01	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen	Bappeda Kota Jambi	1 dokumen	33,000,000	APBD		1 tahun	0
	02	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dpkumen	Bappeda Kota Jambi	1 dokumen	37,250,000	APBD		1 tahun	42,837,500
3.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya hasil kajian yang direkomendasikan bidang ekonomi dan pembangunan	Bappeda Kota Jambi	100%	185,300,000	APBD		1 tahun	213,095,000
	01	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen	Bappeda Kota Jambi	1 dokumen	110,050,000	APBD		1 tahun	126,557,500
	02	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen	Bappeda Kota Jambi	1 dokumen	75,250,000	APBD		1 tahun	86,537,500
4.		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Bappeda Kota Jambi	100%	256,880,400	APBD		1 tahun	295,412,460
	01	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Inovasi Daerah	Bappeda Kota Jambi	40 OPD	145,930,400	APBD		1 tahun	167,819,960

	02	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	- Jumlah Diseminasi - Jumlah Lomba Inovasi	Bappeda Kota Jambi	2 Kali 1 Kali	110,950,000	APBD		1 tahun	127,592,500
--	----	--	---	-----------------------	------------------	-------------	------	--	---------	-------------

Anggaran kegiatan diatas disesuaikan / tidak melebihi pagu atau anggaran yang telah ditetapkan dalam RKPD daerah.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan sebagai penyegaran bagi pegawai diusulkan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Aparatur dengan dana Rp. 60.000.000.- . Untuk lebih terarah dan terkordinasikan serta lebih mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 maka ada perubahan kegiatan menyesuaikan dengan bidang pelaksana kegiatan tersebut supaya tidak terjadi tumpang tindih kegiatan serta jelas penanggung jawabnya dan jelas target kinerja yang dihasilkan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan berbagai isu-isu penting yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi, dalam menopang misi pemerintah daerah yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi dengan Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK dengan indikator sasaran meningkatnya nilai SAKIP.

Untuk Tahun 2021, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan dalam Rancangan Awal Renja 2021
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7,209,742,896	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	
1.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	378,000,000	Nilai Sakip	82	
	01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	10,500,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	
	02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	13,300,000	Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	4 dokumen	
	03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	26,950,000	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4 dokumen	

	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	327,250,000	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4,255,242,896	Tertib administrasi Keuangan	100%	
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,090,242,896	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	
	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90,000,000	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	
	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	5,000,000	Jumlah Dokumen Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1 Tahun	
	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	20,000,000	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Tahun	
	05	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,000,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	
	06	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	20,000,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 Dokumen	
	07	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	10,000,000	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	12 Laporan	
	08	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	10,000,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	
3.	Administrasi Umum		2,270,000,000	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum		100%
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35,000,000	Jumlah Surat Menyurat	12 Bulan	
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	265,000,000	Jumlah Jasa Komunikasi Jumlah Jasa Listrik Jumlah Jasa Sumber Daya Air	100 Mbps 20000 KWH 50 M3	
	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	30,000,000	Jumlah STNK/KIR	23 Unit	
	04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	320,000,000	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan, aset	6 orang	

				dan pengadaan barang/jasa		
	05	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	133,000,000	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	5 orang	
	06	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	50,000,000	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1 Tahun	
	07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	70,000,000	Jumlah Jenis ATK	1 Tahun	
	08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,000,000	Jumlah Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	
	09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70,000,000	Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	
	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120,000,000	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	
	11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	5,000,000	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	100 %	
	12	Penyediaan Makanan dan Minuman	100,000,000	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12 Bulan	
	13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	500,000,000	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	
	14	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	0	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit	
	15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	10,000,000	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	
	16	Pengadaan Mebeleur	0	Jumlah Pengadaan Mebeleur	12 Bulan	
	17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	82,000,000	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	

	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	260,000,000	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	
	19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10,000,000	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	
	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	110,000,000	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	
	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	50,000,000	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	12 Bulan	
4.		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	306,500,000	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	65 Nilai	
	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	7,500,000	Jumlah Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	12 Bulan	
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	12 Bulan	
	03	Pengadaan Pakaian Korpri	0	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	12 Bulan	
	04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	49,000,000	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	12 Bulan	
	05	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	12 Bulan	
	06	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	250,000,000	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	
II		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,444,393,000	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	

1.		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,102,608,620	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Daerah	100%	
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Kabupaten/Kota	293,371,015	Jumlah Dokumen	2 dokumen	
	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Tingkat Kecamatan	0	Jumlah Koordinasi	2 kali	
	03	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	525,649,325	Jumlah Koordinasi	1 Kali	
	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	13,826,640	Jumlah Koordinasi	1 Kali	
	05	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	10,261,640	Jumlah dokumen yang diintegrasikan	5 Dokumen	
	06	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	147,500,000	Jumlah OPD produsen data	39 OPD	
	07	Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah	62,000,000	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data	1 Dokumen	

	08	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	50,000,000	Terlaksananya pengumpulan dan analisis data	1 kali	
2.		Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	76,784,380	Terlaksananya koordinasi Perencanaan Daerah	100%	
	01	Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah	11,872,990	Jumlah koordinasi	2 kali	
	02	Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	64,911,390	Jumlah analisa	2 dokumen	
3.		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	265,000,000	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	
	01	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	27,000,000	Jumlah Monev	4 triwulan	
	02	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	19,000,000	Jumlah OPD yang dievaluasi	39 opd	
	03	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	23,000,000	Jumlah urusan yang terkait SPM	6 urusan	
	04	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	196,000,000	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	
III		PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	800,444,200	Persentase Peningkatan kinerja Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manus	100%	

1.		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	105,000,000	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	100%	
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Pemerintahan	78,170,000	Rapat Koordinasi	12 Kali	
	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Pemerintahan	12,890,000	Supervisi Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Kali	
	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Pemerintahan	13,940,000	Monev terhadap Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Kali	
2.		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	243,158,000	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	100%	
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Pembangunan Manusia	213,581,400	Jumlah Rapat Koordinasi	15 Kali	

	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Pembangunan Manusia	16,276,600	Jumlah Asistensi	12 Kali	
	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13,300,000	Jumlah Monev	12 Kali	
3.		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	452,286,200	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	100%	
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	386,800,000	Rapat Koordinasi	12 Kali	
	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	37,486,200	Jumlah Asistensi	12 Kali	

	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	28,000,000	Jumlah Monev	12 Kali	
IV		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	131,600,000	Persentase Peningkatan kinerja Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	
1.		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	60,700,000	Persentase Peningkatan kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian	100%	
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	39,350,000	Jumlah Koordinasi perencanaan bidang Perekonomian	5 kali	
	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	10,500,000	Jumlah Asistensi Perencanaan Bidang Perekonomian	3 kali	
	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	10,850,000	Jumlah Monev Perencanaan Bidang Perekonomian	2 kali	

2.		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	46,700,000	Persentase Peningkatan kinerja Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	100%	
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	27,000,000	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	5 kali	
	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	10,500,000	Jumlah Asistensi perencanaan bidang Bidang Ekonomi	3 kali	
	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	9,200,000	Jumlah Monev perencanaan bidang Bidang Ekonomi Kreatif	2 kali	
3.		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	24,200,000	Persentase Peningkatan kinerja Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	100%	
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	24,200,000	Jumlah Koordinasi perencanaan bidang Bidang Sumber Daya	5 kali	

	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	0	Jumlah asistensi	3 kali	
V		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	383,491,200	Persentase Peningkatan kinerja Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	100%	
1.		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	61,200,000	Persentase Peningkatan kinerja Perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup	100%	
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	40,300,000	Jumlah Koordinasi perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup	5 kali	
	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	10,500,000	Jumlah Asistensi perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup	3 kali	
	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air	10,400,000	Jumlah Monev perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup	2 kali	

		dan Lingkungan Hidup				
2.		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	75,980,400	Persentase Peningkatan kinerja Perencanaan bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	100%	
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	55,080,400	Umlah Koordinasi perencanaan bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	5 kali	
	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	10,500,000	Jumlah Asistensi perencanaan bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	3 kali	
	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	10,400,000	Jumlah Monev perencanaan bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	2 kali	
3.		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	246,310,800	Persentase Peningkatan kinerja Perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan	100%	
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	176,310,800	Jumlah Koordinasi perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan	5 kali	

		(RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan				
	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	10,500,000	Jumlah asistensi perencanaan bidang keciaptakarya dan kewilayahan	3 kali	
	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Keciaptakarya dan Kewilayahan	59,500,000	Jumlah Monev Perencanaan Bidang Keciaptakarya dan kewilayahan	2 kali	
VI		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	745,571,600	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	
1.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	233,141,200	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	100%	
	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	212,141,200	Jumlah fasilitasi/koordinasi	100%	
	02	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	21,000,000	Aplikasi kelitbangan	1 Aplikasi	
2.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	70,250,000	Persentase implementasi rencana kelitbangan	30%	
	01	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	33,000,000	Jumlah Dokumen	1 dokumen	

	02	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	37,250,000	Jumlah Dpkumen	1 dokumen	
3.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	185,300,000	Terlaksananya hasil kajian yang direkomendasikan bidang ekonomi dan pembangunan	100%	
	01	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	110,050,000	Jumlah Dokumen	1 dokumen	
	02	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	75,250,000	Jumlah Dokumen	1 dokumen	
4.		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	256,880,400	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	100%	
	01	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	145,930,400	Jumlah Inovasi Daerah	40 OPD	
	02	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	110,950,000	- Jumlah Diseminasi - Jumlah Lomba Inovasi	2 Kali 1 Kali	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2021 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi yang memuat visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi.

5.1. Catatan Penting

Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2021 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2021. Yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Jambi 2018-2023. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan dibuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJM Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Jambi tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD, Rencana Kinerja (Renja) OPD, Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJM Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Kota Jambi dengan didukung oleh seluruh *stakeholders* termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 dengan sebaik-baiknya;

2. Walikota, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJM Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJM Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023;
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Jambi berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Jambi untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan secara tahun jamak (multy year);
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jambi, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJM Daerah, Pelaksanaan RPJM Daerah, Pengawasan pelaksanaan RPJM Daerah, serta evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah;
6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
7. Untuk merealisasikan RPJM Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 yang

penuh tantangan dan dinamika pembangunan, maka digunakan 5 (lima) prinsip utama yaitu:

- a. Prinsip perencanaan kegiatan mengacu kepada prinsip perencanaan yang cerdas (*SMART Planning*), yaitu kegiatan terpilih harus diyakini argumentatif dan memiliki kekhususan (*Specific*), terukur (*Measurable*), ketercapaian (*Achievable*), ketersediaan sumber daya (*Resources Availability*), dan waktu (*Time*). Pemilihan kegiatan melalui arah fokus pembangunan yang merujuk pada rencana capaian kinerja berdasarkan bidang pada setiap misi pembangunan, merupakan tujuan bersama yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas OPD, antar tingkatan pemerintahan dan dunia usaha maupun masyarakat, terdiri atas : peningkatan kualitas pendidikan; peningkatan kualitas kesehatan; peningkatan daya beli masyarakat; kemandirian pangan; peningkatan kinerja aparatur; pengembangan infrastruktur wilayah; kemandirian energi dan kecukupan air baku; penanganan pengelolaan bencana; dan pembangunan perdesaan.
- b. Prinsip administrasi perencanaan, yaitu menggunakan *Shewhart Cycle* yang dikenal dengan siklus PDCA dengan tahapan : Rencanakan (*Plan*), Kerjakan apa yang telah direncanakan (*Do*), Periksa atau monitor pelaksanaan (*Check*), dan Aksi tindak lanjut (*Action*). Untuk memudahkan RPJM Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan, maka digunakan pembagian peran OPD untuk melaksanakan RPJM Daerah berdasarkan misi pembangunan, dengan membagi peran OPD setiap bidang pada setiap misi pembangunan. Kelompok OPD dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu : 1) OPD utama; 2) OPD penunjang; 3) OPD pendukung, yang terbagi 2 (dua) kelompok yaitu :
 - 1) OPD Pendukung atas hal yang bersifat umum;
 - 2) OPD Pendukung untuk penjaminan mutu dan akuntabilitas.
- c. Prinsip pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan prinsip akuntabilitas (*accountability*) yang memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu:

- 1) Taat dan sesuai aturan (*Compliance with Regulation*);
 - 2) Sesuai dengan norma profesionalisme (*Adherence with Norm Professionalism*);
 - 3) Berorientasi pada hasil yang berkualitas (*Quality Result Driven*).
- d. Prinsip dukungan kebijakan keuangan mengikuti kebutuhan program terpilih (*Money Follow Program Selected Policy*);
- e. Prinsip pengendalian untuk sukses pelaksanaan kegiatan dengan memerankan :
- Desk monitoring dan evaluasi implementasi program untuk pengendalian kualitas implementasi kegiatan dan ketaatan waktu serta output;
 - Desk akuntabilitas untuk pendampingan dan pengendalian ketaatan terhadap aturan dan disiplin anggaran.
8. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Walikota terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda Kota Jambi secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka *clean government and good governance* (Dunia Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi pada Tahun Anggaran 2021 akan melaksanakan 6 program, 20 Kegiatan dan 87 Sub Kegiatan. Setelah dilakukan evaluasi/pengukuran terhadap kinerja, baik kinerja kegiatan, program maupun kebijakan, diharapkan menjelang akhir Tahun Anggaran Tahun 2021 sasaran kinerja kegiatan akan tercapai sebagaimana yang direncanakan. Adapun keberhasilan terhadap capaian kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain:

1. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM);

2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang pelaksanaan tugas sehari – hari;

Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang kami susun ini jauh dari sempurna dan belum memenuhi apa yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi ini dapat mejadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga dapat menciptakan dokumen Perencanaan yang baik.